

## Analisis Segitiga Kebijakan dan SWOT Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen

### *Policy Triangle and Swot Analysis of Covid-19 Pandemic Handling in Sragen District*

Naufal Azaki

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Indonesia

email: naufal.azaki@ui.ac.id

#### Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia membutuhkan penanganan yang ekstra cermat, ketat dan terukur. Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewajiban untuk mengendalikan tingkat penyebaran dan dampak pandemi Covid-19 melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari regulasi, kelembagaan, anggaran hingga aparatur implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sragen menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) dan analisis segitiga kebijakan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai rilis resmi pemerintah hingga pemberitaan di media dalam kurun waktu Maret 2020 hingga Desember 2021. Hasil pemetaan regulasi dan kebijakan dikonstruksi ke dalam segitiga kebijakan yang meliputi aktor, konteks dan konten lalu dianalisis menggunakan SWOT. Hasil analisis menghasilkan berbagai model strategi yang dinarasikan ke dalam 4 matriks yang secara substansi meliputi percepatan vaksinasi melalui kolaborasi masyarakat, pengembangan *Sragen Smart Governance*, penggiatan sosialisasi yang lebih luas dan tegas, koordinasi kelembagaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah lain, percepatan pengesahan dan pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai Disiplin Protokol Kesehatan, hingga konsolidasi skema jaring pengaman sosial dan penyediaan air bersih pada kawasan yang dilanda kekeringan guna penerapan protokol kesehatan. Model strategi tersebut diharapkan dapat menjadi umpan balik pengambilan keputusan terkait penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Sragen.

**Kata kunci:** Covid-19; kebijakan; segitiga kebijakan; SWOT

#### Abstract

The Covid-19 pandemic that hit Indonesia and the world requires extra careful, strict and measured handling. The Sragen Regency Government as one of the autonomous regions has the obligation to control the level of spread and impact of the Covid-19 pandemic through various policy instruments, ranging from regulations, institutions, budgets to implementing apparatus in the field. This study aims to analyze various policies for handling Covid-19 in Sragen Regency uses a qualitative approach with the *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) methods and the policy triangle analysis. The data used in the form of secondary data obtained from various official government releases to media coverage from March 2020 to December 2021. The results of the mapping of regulations and policies are constructed into a policy triangle which includes actors, context and content and then analyzed using SWOT. The results of the analysis resulted in various strategic models which were narrated into 4 matrices which substantially covered the acceleration of vaccination through community collaboration, the development of *Sragen Smart Governance*, wider and firm socialization activities, institutional coordination between OPD and other

local governments, acceleration of ratification and enforcement of Regional Regulation concerning Discipline of Health Protocols, to the consolidation of social safety net schemes and the provision of clean water in drought-stricken areas for the implementation of health protocols. The strategy model is expected to be a feedback for decision making for the Sragen Regency Government.

**Keywords:** Covid-19; policy; policy triangle; SWOT

## Pendahuluan

Pasca World Health Organization (WHO) menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemi, sebagai bentuk respon Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Covid-19, Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Gugus Tugas dan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang kemudian diikuti oleh sederet regulasi baik yang mengatur pembatasan mobilitas masyarakat guna membatasi penyebaran virus hingga penanganan dampak non-kesehatan seperti dampak sosial dan ekonomi. Indonesia sendiri telah mengalami *outbreak* atau lonjakan kasus hingga menyebabkan kematian mencapai 143.958 orang per 13 Desember berdasar data dari portal resmi Pemerintah covid19.go.id. Gerak pemerintah dalam menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam dan luar biasa mengharuskan perhatian penuh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta untuk merespon secara cepat, tepat dan terukur dalam penanganan pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat secara rutin.

Kabupaten Sragen sebagai salah satu daerah otonom telah menerbitkan serangkaian kebijakan dan peraturan guna mengatasi penyebaran virus Covid-19 serta penanganan dampaknya. Berbagai kebijakan yang ada dikeluarkan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah pusat sesuai urusan pemerintahan. Penelitian ini berusaha untuk mengulas berbagai kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen dengan menggunakan alat analisis segitiga kebijakan dan *Strength, Weakness, Opportunity & Threat* (SWOT). Penggunaan analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, kendala dan berbagai problem di samping juga mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi (Mukhlisin & Pasaribu, 2020, hlm. 37). Adapun penelitian serupa pernah dilakukan oleh Wati, et al (2021) dengan mengambil fokus kajian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menggunakan alat analisis pengambilan keputusan yang sama, yakni segitiga kebijakan dan SWOT melalui penggunaan data sekunder berupa berbagai kebijakan PSBB dan pemberitaan media dalam kurun waktu 25 Februari hingga 5 Juni 2020.

Kajian serupa juga dilakukan oleh Umaroh, et al (2021) yang memfokuskan penelitian di Kota Surakarta dengan menggunakan data sekunder berupa kebijakan penanganan Covid-19 pada kurun waktu bulan Maret hingga Mei tahun 2020. Melalui *rapid analysis* dan *media content analysis* yang kemudian dijabarkan melalui segitiga kebijakan dan SWOT, diperoleh rumusan 5 (lima) model strategi seperti pentingnya regulasi sanksi, sosialisasi buku pedoman, strategi

kolaborasi elemen masyarakat, membentuk portal informasi khusus serta pengembangan kebijakan pemulihan ekonomi utamanya ekonomi kreatif (ekraf).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode segitiga kebijakan dan analisis SWOT guna mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman daripada penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten (Kab.) Sragen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa kebijakan-kebijakan Pemerintah Kab. Sragen yang diakses melalui berbagai portal resmi Pemkab Sragen seperti [corona.sragenkab.go.id](http://corona.sragenkab.go.id), portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta *instagram* [kominfo.sragen](https://www.instagram.com/kominfo.sragen) serta berbagai pemberitaan media elektronik dalam kurun waktu Maret 2020 hingga Desember 2021.

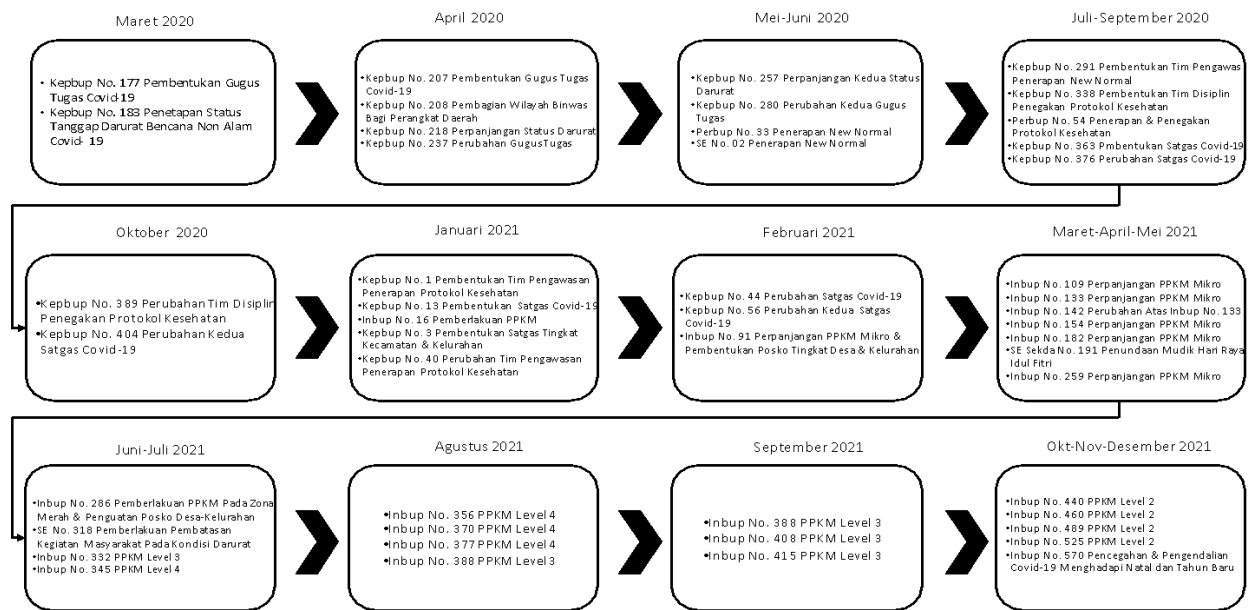
Analisis segitiga kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi aktor, konteks/sektor dan konten/substansi sebuah kebijakan (Umaroh, et al, 2020, hlm. 30). Sedangkan penggunaan analisis SWOT ditujukan untuk dapat menemukan kekuatan (positif) hingga masalah agar dapat diatasi untuk perbaikan kebijakan (Wati, et al, 2021, hlm. 26). Hasil analisis SWOT dapat bermanfaat sebagai *feedback* untuk mempertajam tujuan dan strategi sebuah kebijakan (Mukhlisin & Pasaribu, 2020, hlm. 37).

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil identifikasi, kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Pemkab Sragen ialah penetapan status darurat bencana non-alam melalui Keputusan Bupati No. 360/183/003/2020 serta pembentukan gugus tugas penanganan melalui Keputusan Bupati No. 443.2/177/003/2020. Kedua penetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 & 17 Maret 2020. Adapun hasil dan pembahasan kajian ini menggunakan analisis segitiga kebijakan yang meliputi aktor, konteks dan konten kebijakan yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui SWOT untuk menghasilkan model strategi penanganan yang lebih baik di Kab. Sragen.

#### Bagan 1.

#### Alur Waktu Kebijakan Penanganan Covid-19 di Sragen



Sumber: diolah Peneliti.

Tabel 2.

### Analisis Segitiga Kebijakan Penanganan Pandemi di Kabupaten Sragen

Sektor/Konteks	Aktor	Konten/Substansi
Pemerintahan	Bupati - BPBD	Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19
	Bupati - Satpol PP	Pembentukan Tim Penegakan Hukum dan Disiplin Protokol Kesehatan
	Bupati - Perangkat Daerah	Penetapan PSBB/PPKM
	Bupati - BPKPD	Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penanganan Covid-19
	Bupati - Bawaslu	Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Bupati (Pilkada Serentak) Tahun 2020
Agama	Bupati - Sekda	Pengaturan Mudik, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
	Kanwil Agama	Pengaturan Peribadatan di Masa Pandemi Covid-19
Kesehatan	Bupati - Dinkes	Penetapan Technopark sebagai RS Darurat Covid-19
Sosial-Ekonomi	Bupati - Dinsos	Pemberian Bantuan Sosial
	Bupati - Dinas Perdagangan	Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar
	Bupati	Pembatasan Mobilitas Perkantoran, Layanan dan Fasilitas Publik
Pendidikan	Bupati - Dinas Pendidikan	Pengaturan Pedoman Pembelajaran

Sumber: diolah Peneliti.

Berdasarkan identifikasi, diketahui bahwa aktor kebijakan penanganan Covid-19 berpusat pada Bupati dan Perangkat Daerah seperti BPBD untuk gugus tugas dan perumusan kebijakan Covid-19, Satpol PP untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, hingga Kanwil Agama untuk pedoman protokol peribadatan keagamaan. Pelibatan OPD ini disesuaikan dengan wewenang dan

tugas-fungsi OPD masing-masing, seperti pengaturan pendidikan jarak jauh ataupun tatap muka yang menjadi ranah Dinas Pendidikan dan pengaturan keringanan retribusi bagi pedagang pasar oleh Dinas Perdagangan. Analisis kemudian dilanjutkan melalui metode pemetaan analisis SWOT yang membagi ke dalam matriks di bawah ini.

Tabel 2.  
Matriks Analisis SWOT

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<b>Internal</b>	1. Respon cepat pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan beserta regulasi yang memadai	1. Penegakan disiplin protokol yang minim di tingkat desa
<b>Eksternal</b>	2. Ketersediaan RS Darurat Covid-19, layanan isolasi mandiri terpusat, dan layanan vaksinasi yang memadai	2. Program jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi belum inklusif 3. Sosialisasi kebijakan yang kurang masif dan informatif
<i>Opportunity</i>	S-O	W-O
1. Partisipasi segenap elemen masyarakat sangat kuat 2. Peluang pengembangan <i>smart governance</i>	1. Percepatan vaksinasi melalui kolaborasi dengan masyarakat 2. Pengembangan <i>Sragen Smart Governance</i> yang lebih progresif	1. Giat sosialisasi yang lebih masif baik secara digital maupun langsung. 2. Penguatan koordinasi kelembagaan antar OPD 3. Percepatan pengesahan Perda Protokol Kesehatan
<i>Threat</i>	S-T	W-T

1. Kesadaran masyarakat yang rendah akan disiplin protokol kesehatan		
2. Bencana kekeringan menyebabkan kesulitan akses air bersih utamanya di wilayah Sragen Utara	1. Penguatan koordinasi antar daerah	1. Konsolidasi program jaring pengaman sosial yang lebih inklusif.
3. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ)	2. Penyediaan akses internet di wilayah yang membutuhkan	2. Alokasi anggaran ke dalam belanja pembangunan (belanja langsung) yang lebih besar.

*Sumber: diolah Peneliti*

### Analisis Kekuatan (*Strength*)

#### 1. Respon Cepat Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan Beserta Regulasi Yang Memadai

Berdasarkan identifikasi atas berbagai regulasi yang telah dikeluarkan beserta waktu diterbitkan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki respon cepat atas berbagai kondisi melalui penerbitan berbagai regulasi. Regulasi pertama ialah Keputusan Bupati No. 360/183/003/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penanganan Covid-19 Di Kab. Sragen yang diikuti dengan pembentukan Gugus Tugas dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga telah mengeluarkan Perbup No. 35 tahun 2020 yang menjadi pedoman pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sragen tahun 2020. Demi menghindari adanya maladministrasi dan penyelewengan, Pemkab juga telah mengeluarkan berbagai pengaturan mengenai keuangan daerah misalnya Kepbup No. 239 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Percepatan Penanganan Covid-19, Kepbup No. 185 Tahun 2020 dan Kepbup No. 52 Tahun 2021 yang mengatur perihal pengeluaran tidak terduga APBD untuk pengadaan alat kesehatan, hingga Kepbup No. 227 Tahun 2020 dan Kepbup No. 3 Tahun 2021 mengenai penetapan nomor rekening gugus tugas di BPBD.

#### 2. Ketersediaan RS Darurat Covid-19, Layanan Isolasi Mandiri Terpusat dan Layanan Vaksinasi yang Memadai

Salah satu kebijakan yang berpengaruh signifikan terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen adalah adanya RS Darurat Covid-19 yang dibentuk dengan memanfaatkan *Sragen Technopark* yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 445/222/003/2020. Selain itu pemanfaatan beberapa bangunan sekolah dan disediakannya fasilitas isolasi mandiri terpusat menjadi jalan keluar yang efektif dibanding isolasi mandiri

di rumah (Baihaqi, 2021). Selain itu layanan vaksinasi Sragen juga baik Kab. Sragen juga terus melakukan upaya optimalisasi layanan vaksinasi. Upaya ini berhasil mengantarkan Kab. Sragen dalam memberikan vaksin kepada penduduknya sejumlah 13 ribu dosis dalam satu hari. Pencapaian ini turut diapresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah dengan memberikan vaksin tambahan sejumlah berupa 20 ribu dosis. Hal ini dapat tercapai karena layanan vaksinasi telah tersedia di 48 fasilitas kesehatan, termasuk didalamnya 25 Puskesmas, 1 Unit dari Dinas Kesehatan, dan 22 dari pihak swasta yang tersebar di 20 kecamatan serta dilakukan secara *door to door* (Miyos, 2021).

### Analisis Kelemahan (*Weakness*)

#### 1. Penegakan Disiplin Protokol Yang Minim di Tingkat Desa

Studi Elitzur, et al (2021) menyimpulkan bahwa *policy timing* dan ketegasan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pengendalian pandemi Covid-19. Studi tersebut memberikan gambaran bahwa Covid-19 memiliki durasi lamanya sakit 18 hari dan kebijakan pemerintah yang terlambat seminggu dapat menyebabkan penularan naik 3 kali lipat. Oleh karena itu, penanganan pandemi di Sragen juga membutuhkan ketegasan hingga level terbawah masyarakat, dalam hal ini desa hingga RT. Meskipun telah dikeluarkan berbagai regulasi terkait satgas Covid-19 hingga level desa dan diselenggarakannya operasi gabungan, Bupati sendiri mengakui bahwa ketegasan penegakan protokol kesehatan di tingkat masyarakat masih kurang optimal. Salah satunya ialah ketika Bupati menemukan pelanggaran prokes pada hajatan yang digelar di Kecamatan Jenar (Maulani, 2021). Selain itu, pengaturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat tidak dapat dilaksanakan melalui Surat Edaran (SE) mengingat SE tidak bersifat mengatur dan memberi sanksi. Hal ini merujuk pada diterbitkannya Surat Edaran Nomor 360/318/038/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Darurat Covid-19. Begitu pula Peraturan Bupati dan Instruksi Bupati tidak dapat mengatur perihal sanksi/denda karena berdasar UU Nomor 12 Tahun 2011 pengaturan berkenaan dengan itu hanya dapat dilakukan melalui Undang Undang atau Peraturan Daerah.

#### 2. Program Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Dampak Ekonomi Belum Menyeluruh

Salah satu program jaring pengaman sosial yang telah dilakukan oleh Pemkab Sragen ialah menyalurkan paket sembako ke kelompok masyarakat rentan (Diskominfo, 2020). Selain itu Pemkab juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 900/298/003/2020 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar Bagi Wajib Retribusi Pasar pada tanggal 6 Juli 2020 sebagai insentif pada masa pandemi Covid-19. Namun berdasarkan analisis regulasi dan pemberitaan, belum begitu banyak program khusus dari Pemkab Sragen untuk sektor-sektor ekonomi lain seperti bantuan modal untuk UMKM yang mengalami kontraksi cukup dalam. Adapun program *Night Market Sukowati* yang memfasilitasi

pedagang kuliner justru kontradiktif dengan kebijakan PPKM karena mengakibatkan adanya kerumunan (Nurvitasari, 2021). Saat ini Sragen lebih bergantung pada program pemulihan ekonomi dari Pemerintah Pusat seperti Bantuan Pemerintah bagi UMKM (BPUM), Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR, dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Nurvitasari, 2021). Persoalan ini juga terkait basis data yang kurang *update*, penyaluran yang lambat, ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dengan daerah, kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemkab, hingga koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cenderung menunggu instruksi Bupati (UCLG ASPAC, 2021).

### 3. Sosialisasi kebijakan yang kurang masif dan informatif

Sosialisasi utama kebijakan penanganan Covid-19 secara digital dilakukan melalui *website* corona.sragenkab.go.id, portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta *instagram* kominfo.sragen. Informasi lain dapat diakses melalui berbagai pemberitaan media maupun layanan media sosial instansi, seperti *instagram* puskesmas masaran 1. Namun terdapat beberapa identifikasi terkait kurang informatifnya berbagai layanan tersebut. Misalnya informasi peraturan mengenai PPKM di JDIH banyak yang masih tertera status "Berlaku" padahal status peraturan tersebut sudah "Tidak Berlaku". Ini banyak ditemukan di berbagai Inbup PPKM. Selain itu, layanan portal JDIH juga tidak *update* akan regulasi terkini dilihat dari banyaknya peraturan yang tidak dimuat dan tidak dapat di *download*. Adapun portal corona.sragenkab.go.id juga tidak memberikan informasi mengenai perkembangan regulasi dan regulasi apa yang saat ini sedang berlaku/diterapkan di Kab. Sragen. Informasi mengenai tren kasus secara *time series* juga belum disajikan secara informatif visualisasinya sehingga tidak dapat diketahui jumlah korban Covid-19 dari dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, belum begitu banyak himbauan untuk melapor jika ada pelanggaran protokol kesehatan beserta kontak yang dapat dihubungi.

Adapun kebijakan pemberlakuan pengetatan di level yang berbeda-beda yang berganti dengan cepat dapat membuat kesimpangsiuran di masyarakat mengenai kebijakan mana yang pada waktu tersebut diterapkan. Durasi penerapan yang terlalu cepat contohnya ialah Inbup 332/2021 PPKM Level 3 yang hanya berlangsung 4 hari (21-25 Juli 2021). Padahal durasi pembatasan yang lebih lama akan lebih efektif dalam mengurangi tingkat penyebaran (Sun, et al., 2021). Terbukti dari pemberlakuan Inbup 345/2021 dimana PPKM naik menjadi Level 4 untuk masa 26 Juli sd 9 Agustus 2021.

### Analisis Peluang (*Opportunity*)

#### 1. Partisipasi Elemen Masyarakat Sangat Kuat

Berbagai bantuan dari berbagai elemen masyarakat sangat kuat. Misalnya ialah bantuan berupa 200 pakaian hazmat atau Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan 200 *face shield* yang disalurkan oleh BLK Surakarta kepada Pemkab. Sragen



(Prabawanti, 2020), bantuan mobil operasional dari PT Ndayu Alam Asri (Miyos, 2021), bantuan 100 Oksigen Konsentrator dari Pemkot Surakarta (Mega, 2021) hingga bantuan dari berbagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai dari APD, masker, *hand sanitizer*, hingga sembako (Diskominfo, 2020). Berbagai bantuan tersebut mengindikasikan kuatnya keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen.

## 2. Peluang Pengembangan *Smart Governance*

Pandemi Covid-19 membuat berbagai macam hal terdisrupsi dan proses digitalisasi beragam aspek kehidupan menjadi sangat masif. Sebagai upaya menjemput *demand* dan keharusan tersebut maka pengembangan *smart city* menjadi sebuah keniscayaan. *Smart city* sendiri ialah sebuah konsep besar yang tidak hanya menyasar digitalisasi pelayanan publik dan penggunaan teknologi informasi berupa *big data* dalam perumusan kebijakan/tata kelola pemerintahan, namun juga meliputi dimensi partisipasi masyarakat secara penuh (Tomor, et al, 2019). Peluang ini turut merespon perlunya perbaikan layanan sistem informasi pemerintah.

### Analisis Ancaman (*Threat*)

#### 1. Kesadaran Masyarakat Yang Rendah Akan Disiplin Protokol Kesehatan

Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, kebijakan pembatasan mobilitas sosial dan penerapan protokol kebijakan tidak akan terlaksana dengan optimal tanpa diiringi kesadaran dari masyarakat untuk melakukannya. Hal ini terjadi di Kabupaten Sragen yang menurut penuturan dari Bupati Sragen sendiri bahwa beberapa penyebab melonjaknya kasus Covid-19 di Sragen ialah akibat masih banyaknya pelanggaran seperti masyarakat yang nekat menyelenggarakan hajatan tanpa protokol yang ketat, masyarakat (pasien) yang tidak jujur akan status Covid-19 hingga keengganan untuk melakukan *testing* secara mandiri (Mega, 2021). Berdasarkan hasil survey BPS ditemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Sragen akan protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, dan menjaga etika batuk berada di bawah capaian Prov. Jawa Tengah dan nasional. Perilaku abai yang lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah dan nasional ini juga tercermin dari tidak adanya perbedaan signifikan terkait ketentuan *Work From Home* (WFH) bagi perkantoran saat pemberlakuan PPKM (BPS, 2021). Selain itu, banyaknya masyarakat yang tinggal di Sragen namun bekerja di kota lain utamanya Kota Surakarta juga belum termonitor dengan penuh apalagi jika terdapat perbedaan kebijakan pengetatan mobilitas di dua daerah tersebut.

#### 2. Bencana Kekeringan Menyebabkan Kesulitan Akses Air Bersih Utamanya di Wilayah Sragen Utara

Kabupaten Sragen adalah salah satu daerah yang setiap tahunnya selalu mengalami bencana kekeringan akibat tidak tersedianya sumber dan akses air bersih yang memadai utamanya pada bagian Sragen Utara. Padahal keberadaan air sangat dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19 ini mengingat protokol kesehatan salah satunya mewajibkan cuci

tangan secara rutin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bencana kekeringan pada tahun 2020 yang lalu menurut BNPB per Agustus 2020 terjadi sebanyak 16 kali dan berdampak pada 948.754 orang (CNN Indonesia, 2021). Pemkab sendiri telah merespon kondisi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 360/314/003/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Pada Musim Kemarau Tahun 2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kab. Sragen juga telah menyalurkan bantuan berupa tangki air bersih di 7 (tujuh) kecamatan terdampak sebagai solusi jangka pendek (Diskominfo, 2020). Kekeringan yang menahun ini berpotensi menyebabkan pelaksanaan protokol kesehatan tidak optimal.

### 3. Keterbatasan Masyarakat Dalam Mengakses Internet Untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Berdasar *media content analysis*, diketahui bahwa kendala akses internet terjadi pada wilayah Sragen Utara yang meliputi Kecamatan Sumberlawang, Miri, Tangen dan Jenar. Kendala ini dapat menyebabkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak optimal sedangkan pembelajaran tatap muka baru harus selalu mempertimbangkan status pembatasan di masing-masing wilayah.

Berdasarkan penjabaran analisa SWOT yang telah diuraikan di atas, dirumuskan berbagai model penguatan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen yang turut tertuang dalam matriks SWOT sebelumnya. Berikut penjabarannya.

#### Strategi *Strength-Opportunity* (SO)

##### 1. Percepatan vaksinasi melalui kolaborasi dengan masyarakat

Meskipun telah mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah, nampaknya vaksinasi tetap perlu digiatkan. Strategi *Strength-Opportunity* ini mengelaborasi kekuatan Pemkab dalam menyediakan dosis vaksin dan tenaga kesehatan yang memadai serta tingginya partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi. Oleh karenanya, diperlukan model kolaborasi yang lebih luas yakni bagaimana pihak masyarakat hingga swasta dilibatkan dalam vaksinasi, misalnya mendorong perusahaan/pabrik/industri, Koperasi Unit Desa (KUD), PKK, hingga perkantoran untuk melakukan vaksinasi mandiri dengan dibantu oleh Pemkab. Selain itu, perlunya menjangkau vaksinasi tidak hanya kalangan lansia namun juga disabilitas juga perlu mendapat perhatian.

##### 2. Pengembangan Sragen *Smart Governance* yang lebih progresif

*Smart Governance* adalah kerangka yang lebih luas daripada *Smart City*. *Smart Governance* memfokuskan pada bagaimana suatu pemerintah merumuskan hingga menetapkan kebijakan dan *smart city* ialah konsep utama dari dimensi-dimensi teknis seperti *smart living*, *smart people*, *smart economy*, *smart mobility* dan *smart environment* (Pereira, et al, 2018). Dalam konteks bagaimana Kab. Sragen menangani pandemi Covid-

19, konsep ini dapat dikebumikan dengan misalnya penggunaan *mass video surveillance* dan *big data* sebagai basis sistem *surveillance*/pengawasan mobilitas masyarakat. Sebuah sistem surveilans yang aktif akan mampu memonitor kedisiplinan masyarakat sehingga penanganan pandemi akan lebih efektif (Shorfuzzaman, et al., 2021). Selain itu, pengembangan *early warning system* sebagai alat input pengambilan keputusan, penguatan sistem pemrosesan data utamanya dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi dan 3 T (*testing, tracing, treatment*) dan penyaluran bansos hingga membangun sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mereview kebijakan pemerintah juga diperlukan (BAPPENAS, 2021). Sistem ini pun tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten namun juga hingga level RT/RW.

### Strategi *Weakness-Opportunity* (WO)

#### 1. Giat sosialisasi yang lebih masif baik secara digital maupun langsung

Pemasifan sosialisasi berjalan beriringan dengan perbaikan layanan digital Pemkab. Sragen. Adapun data surveilans secara rutin telah di update di portal corona.sragenkab.go.id. Namun belum ada info *update* regulasi sehingga harus mencarinya secara terpisah seperti telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, diperlukan pula menu khusus dalam portal tersebut untuk menangkal disinformasi *hoax* yang seringkali beredar di masyarakat sehingga publik dapat menjadikannya referensi acuan benar/tidaknya suatu informasi. Perbaikan pada aspek visualisasi data juga diperlukan agar masyarakat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Perbaikan ini termasuk visualisasi berbasis spasial yang di satu sisi memberi info kewaspadaan berbasis spasial kepada masyarakat dan di sisi lain membuat sistem surveilans lebih efektif (Pribadi, et al., 2021). Giat sosialisasi juga membutuhkan terobosan misalnya dengan membangun argumen teologis menyangkut proses peribadatan hingga kehalalan vaksin (Bappenas, 2021).

#### 2. Penguatan koordinasi kelembagaan antar OPD

Temuan UCLG ASPAC terkait kecenderungan OPD yang bergerak menunggu instruksi Bupati perlu ditindaklanjuti. Dalam hal ini diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang mendorong inisiatif dan keberanian untuk mengambil keputusan (dengan berbasis data dan *evidence* yang kuat). Selain itu koordinasi menyeluruh juga terkait perbaikan basis data masyarakat miskin dan kelompok rentan guna penyaluran berbagai skema bantuan jaring pengaman sosial, alur proses bisnis input data serta transparansi (Bappenas, 2021). Desa, RT dan RW perlu lebih diberdayakan dalam melakukan input secara rutin melalui sistem informasi digital.

#### 3. Percepatan Pengesahan Perda Protokol Kesehatan

Uraian pada analisa SWOT sebelumnya telah mengangkat perihal kesulitan pengaturan sanksi (denda) pelanggar proses yang tidak dapat diatur melalui SE, Instruksi Bupati ataupun Peraturan Bupati dan hanya dapat diatur melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, strategi *Weakness-Opportunity* ini mengajukan strategi percepatan pengesahan

Perda Prokes Sragen mengingat *Strength* yang dimiliki berupa *stakeholder* (dalam hal ini DRPD Sragen) sangat proaktif dalam membantu Pemkab menangani pandemi.

#### Strategi *Strength-Threat* (ST)

##### 1. Penguatan koordinasi antar daerah

Koordinasi antar daerah utamanya diperlukan sebagai strategi dalam membangun koherensi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini merespon mengenai banyaknya warga Sragen yang bekerja di kota lain seperti Kota Surakarta.

##### 2. Penyediaan akses internet di wilayah yang membutuhkan

Akses internet yang memadai mutlak dibutuhkan utamanya bagi wilayah yang kesulitan dalam koneksi internet. Penyediaan ini misalnya dapat dilakukan dengan membangun titik *wifi* di tiap desa atau melalui kerjasama dengan *provider* internet dengan skema subsidi seperti inisiatif yang dilakukan oleh Pemdes Tanggan di Kec. Gesi dan Desa Ngargotirto, Kec. Sumberlawang. Dukungan Pemerintah Kabupaten diperlukan untuk meluaskan penetrasi koneksi internet tersebut.

#### Strategi *Weakness-Threat* (WT)

##### 1. Konsolidasi program jaring pengaman sosial yang lebih inklusif

Strategi ini menghendaki adanya konsep besar jaring pengaman sosial dengan skema sasaran dan diferensi bantuan sosial masing-masing. Hal ini diperlukan mengingat kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tidak terbatas pada satu kelompok saja, melainkan multidimensi. Misalnya ialah jaring pengaman sosial bagi anak yang menjadi yatim-piatu karena orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19, bantuan modal dan pemasaran bagi UMKM hingga membangun sistem penyaluran bantuan dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan sebagai pelengkap bantuan dari pemerintah. Membangun skema *social safety net* yang inklusif dan bermakna ini penting sebagai bentuk penyelarasan strategi pemulihan ekonomi seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 (Bappenas, 2021).

##### 2. Alokasi anggaran ke dalam belanja pembangunan (belanja langsung) yang lebih besar

Berdasarkan perhitungan, alokasi belanja tidak langsung di APBD Kab. Sragen dalam kurun waktu 2015-2019 mencapai 63% sedangkan belanja langsung hanya sebesar 37%. Hal ini berarti alokasi APBD lebih banyak diperuntukkan pada belanja rutin seperti belanja pegawai hingga bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja pembangunan (belanja barang dan jasa serta modal) masih sangat minim. Sedangkan berdasar uraian mengenai keterbatasan akses air bersih dan penyediaan akses internet untuk PJJ, dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk menyediakannya. Oleh karena itu diperlukan transformasi dari segi belanja untuk mendorong percepatan penyediaan kedua layanan masyarakat tersebut. Masa pandemi covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan transformasi tersebut.

## Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki respon yang cepat dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui diterbitkannya serangkaian peraturan dan kebijakan yang menyasar langsung pembatasan mobilitas masyarakat, disiplin protokol kesehatan hingga terkait tata kelola keuangan daerah. Selain itu tingginya partisipasi elemen masyarakat dan swasta serta kapasitas layanan kesehatan yang baik dan penetrasi vaksinasi yang luas turut menjadi kekuatan dan peluang dalam penanganan pandemi. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dan ancaman seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat akan prokes, sosialisasi melalui sistem informasi yang kurang masif dan informatif, hingga belum adanya pengaturan berkenaan dengan sanksi bagi pelanggar prokes. Oleh karena itu dirumuskan 4 (empat) strategi utama berbasis analisa SWOT antara lain percepatan vaksinasi melalui kolaborasi dengan masyarakat, pengembangan *Sragen Smart Governance*, percepatan pengesahan dan pemberlakuan Perda Prokes, pengembangan skema jaring pengaman sosial, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar *stakeholder*, hingga alokasi anggaran utamanya bagi penyediaan akses air bersih dan koneksi internet.

## Referensi

- Baihaqi, A. (2021, July 6). *Kasus Covid-19 di Sragen Menurun, Bupati Beberkan Kunci Suksesnya*. Retrieved December 12, 2021, from Solopos: <https://www.solopos.com/kasus-covid-19-di-sragen-menurun-bupati-beberkan-kunci-suksesnya-1137442>
- BAPPENAS. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas RI.
- CNN Indonesia. (2021, September 20). *"BNPB Nyatakan Sragen Jateng Alami Kekeringan" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200920224905-20-548697/bnpb-nyatakan-sragen-jateng-alami-kekeringan*. Retrieved December 12, 2021, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200920224905-20-548697/bnpb-nyatakan-sragen-jateng-alami-kekeringan>
- Diskominfo. (2020, April 20). *Jaring Pengaman Sosial Covid-19:PEMKAB SRAGEN SALURKAN 59.087 PAKET SEMBAKO BAGI WARGA TERDAMPAK*. Retrieved December 12, 2021, from Sragenkab.go.id: <https://www.sragenkab.go.id/berita-2050.html>
- Diskominfo. (2020, April 22). *BANTUAN PENANGANAN COVID-19 KEPADA PEMKAB SRAGEN TERUS MENGALIR*. Retrieved December 12, 2021, from Sragenkab.go.id: <https://www.sragenkab.go.id/berita-2052.html>
- Elitzur, M., Kaplan, S., Ivezic, Z., & Zilberman, D. (2021, July). The impact of policy timing on the spread of COVID-19. *Infectious Disease Modelling*, 6, 942-954.
- Maulani, M. P. (2021, September 14). *Temui Hajatan Tak Sesuai Peraturan, Bupati Sragen Minta Camat Bubarkan Acara*. Retrieved December 13, 2021, from TribunJateng.com: <https://jateng.tribunnews.com/2021/09/14/temui-hajatan-tak-sesuai-peraturan-bupati-sragen-minta-camat-bubarkan-acara>
- Mega. (2021, June 14). *SOSIALISASI EDUKASI PROTOKOL KESEHATAN DAN PEMECAHAN MASALAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DI SRAGEN*.

- Retrieved December 12, 2021, from Diskominfo Sragen: <http://kominform.sragenkab.go.id/berita-1790-sosialisasi-edukasi-protokol-kesehatan-dan-pemecahan-masalah-dalam-penanganan-covid19-di-sragen.html>
- Miyos. (2021, July 13). *PEMKAB SRAGEN TERIMA BANTUAN MOBIL UNTUK OPERASIONAL SATGAS COVID-19*. Retrieved December 12, 2021, from Sragenkab.go.id: <https://www.sragenkab.go.id/berita-2349.html>
- Mukhlisin, A., & Pasaribu, M. H. (2020, November). ANALISIS SWOT DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENGAMBIL KEBIJAKAN YANG TEPAT. *Journal Research and Education Studies*, 1(1), 33-43.
- Nurvitasari, I. (2021, April 22). *Dilema Pemulihan Ekonomi Sragen*. Retrieved December 12, 2021, from Jatengdaily.com: <https://jatengdaily.com/2021/dilema-pemulihan-ekonomi-sragen/>
- Pembelajaran Daring Masih Banyak Masalah di Wilayah Utara Sragen*. (2020, August 6). Retrieved December 13, 2021, from News Real Indonesia: <https://newsreal.id/2020/08/06/pembelajaran-daring-masih-banyak-masalah-di-wilayah-utara-sragen/>
- Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. *Information Polity*, 23, 143-162.
- Prabawanti, M. A. (2020, April 19). *Atasi Dampak Covid-19, BLK Surakarta Kirim Bantuan APD*. Retrieved December 12, 2021, from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/04/19/222058426/atasi-dampak-covid-19-blk-surakarta-kirim-bantuan-apd-ke-sragen>
- Pribadi, D. O., Saifulla, K., Putra, S. A., Nurdin, M., Iman, L. S., & Rustiadi, E. (2021). Spatial analysis of COVID-19 outbreak to assess the effectiveness of social restriction policy in dealing with the pandemic in Jakarta. *Spatial and Spatio-temporal Epidemiology*, 39.
- Shorfuzzaman, M., Hossain, M. S., & Alhamid, M. F. (2021). Towards the sustainable development of smart cities through mass video surveillance: A response to the COVID-19 pandemic. *Sustainable Cities and Society*, 64.
- Sun, J., Zheng, Y., Liang, W., Yang, Z., Zeng, Z., Li, T., . . . Zhong, N. (2021, October 5). Quantifying the Effect of Public Activity Intervention Policies on COVID-19 Pandemic Containment Using Epidemiologic Data From 145 Countries. *Science Direct*.
- Tarmy, A. (2021, February 23). *Susah Sinyal, Desa di Sragen Bikin 176 Jaringan Internet Mandiri*. Retrieved December 13, 2021, from detiknet: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407248/susah-sinyal-desa-di-sragen-bikin-176-jaringan-internet-mandiri>
- Tomor, Z., Meijer, A., Michels, a., & Geertman, S. (2019). Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review. *Journal of Urban Technology*, 26(4), 3-27.
- UCLG ASPAC. (2021). *Adaptasi Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data Untuk Jaring Pengaman Sosial*. United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC). UCLG ASPAC.
- Umaroh, A. K., Mustahziyin, C. K., Lestari, P. B., Kevaladandra, Z., & Pratomo, H. (2021, Maret). REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN SEGITIGA KEBIJAKAN DAN ANALISIS SWOT. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI*, 10(1), 29-40.

- Warga Desa di Sragen Tak Lagi Susah Sinyal.* (2021, November 5). Retrieved December 13, 2021, from Kompas tv: <https://www.kompas.tv/article/232134/warga-desa-di-sragen-tak-lagi-susah-sinyal>
- Wati, R. L., Elisabet, B. M., Goenawan, G., Nurhanifah, & Pratomo, H. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. *Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(1), 24-35.